

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pertumbuhan ekonomi merujuk kepada kegiatan perekonomian suatu negara yang dapat menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai salah satu pembangunan. Serta terdapat sektor-sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor formal dan sektor informal. Sektor formal adalah sektor yang usahanya berskala besar dan mendapatkan izin dari pemerintah terkait, sedangkan sektor informal merupakan usaha berskala kecil dengan modal dan ruang lingkup yang terbatas. Adanya sektor informal perekonomian rakyat dapat berlangsung secara baik dan berkelanjutan (Lestari et al, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional yang menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan dan mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara (Sidik et al, 2021). UMKM adalah salah satu penopang perekonomian bangsa Indonesia. Sebagai

salah satu kekuatan perekonomian bangsa Indonesia UMKM harus dapat bertahan dalam berbagai kondisi perekonomian. UMKM dapat diandalkan dalam kondisi perekonomian yang sedang tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah mendukung perkembangan berbagai UMKM baru sebagai bentuk kreativitas produk lokal yang dapat bersaing di pasar bebas (Pritandhari, 2022).

Masyarakat mempunyai peranan dalam pembangunan nasional, terutama dalam pembangunan ekonomi yaitu melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah diakui sebagai salah satu yang paling penting dalam perekonomian terlepas dari ukuran perekonomiannya (Hidayat et al, 2022). Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan (Sarfiyah et al, 2019).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI, ada sekitar 64,2 juta unit usaha yang beroperasi di Indonesia. 99,6% di antaranya adalah usaha mikro, 0,30% usaha kecil, dan 0,07% usaha menengah, dan 0,01% usaha besar. Setiap tahunnya, UMKM diperkirakan memberi kontribusi

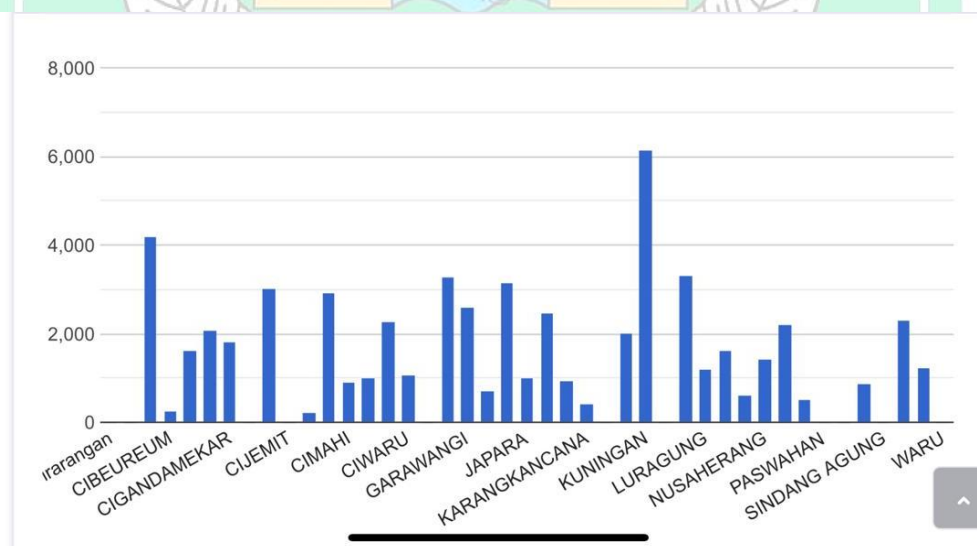
ekonomi sebesar lebih dari 60% bagi Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) atau sekitar 8.573.896 milyar rupiah. Selain berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto, UMKM juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. UMKM menyerap 116 juta atau sekitar 97% dari tenaga kerja nasional, di mana jumlah tenaga kerja terbanyak diserap oleh usaha mikro (ukmindonesia.id).

Begitu besarnya andil UMKM dalam menopang perekonomian suatu negara sehingga keberadaan UMKM sangat diharapkan oleh suatu negara mana pun karena perannya yang vital dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya pertumbuhan di sektor usaha mikro semakin terbukanya kesempatan peluang kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan berkurangnya jumlah pengangguran berarti sektor UMKM banyak merekrut tenaga kerja yang berarti akan membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan (Al Farisi et al, 2022).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro), Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha yang ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan (Astuti, 2021).

Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki beragam bidang industri. Secara geografis, Kuningan merupakan wilayah pertanian dengan mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani, tetapi terdapat juga beberapa UMKM atau disebut juga *home industry*. Berikut penulis uraikan:



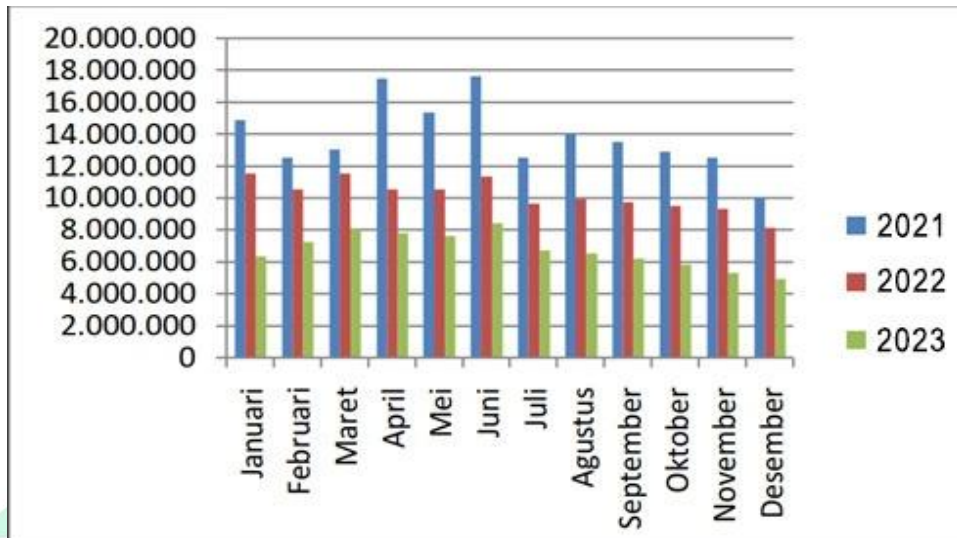
Sumber : diskopdagperin

Gambar 1.1
Jumlah UMKM di Kabupaten Kuningan Tahun 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023, jumlah UMKM di Kecamatan Kuningan adalah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kuningan adalah sebanyak 6.159 UMKM. Yang mana Kecamatan Kuningan memegang posisi tertinggi untuk jumlah dari UMKM dibandingkan dengan Kecamatan lain dari keseluruhan jumlah UMKM di Kabupaten Kuningan sebanyak 59.561 UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi di Kecamatan Kuningan. Jumlah UMKM di Kecamatan Kuningan yang sudah mencapai angka ribuan diharapkan dapat menjadikan perekonomian wilayah meningkat melalui pembukaan lapangan usaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat setempat. Dari sekian banyak UMKM di Kecamatan Kuningan, kebanyakan dari pelaku UMKM bergerak di bidang perdagangan.

Kinerja adalah hasil proses dari pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari pegawai dan organisasi bersangkutan (Oktavia et al, 2023). Kinerja UMKM berarti hasil kerja yang dicapai oleh para pelaku UMKM pada waktu tertentu. Pada suatu kinerja yang dihasilkan oleh suatu UMKM dengan baik maka akan semakin kokoh untuk menjadi tulang punggung di perekonomian dan akan semakin berperan penting dalam perekonomian nasional. Kinerja UMKM yang terjadi di lapangan kurang efektif dikarenakan beberapa faktor, seperti halnya kekurangan modal sebagai penunjang aktivitas UMKM dan juga kurangnya pengetahuan juga

keterampilan dalam mengelola atau menghasilkan suatu produk yang dimilikinya.



Sumber: diskopdagperin

Gambar 1.2
Grafik Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2023

Mengacu pada gambar 1.2 terlihat bahwa kinerja UMKM di Kabupaten Kuningan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini apabila tidak diatasi akan mengakibatkan UMKM yang ada di Kabupaten Kuningan gulung tikar. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kinerja usaha UMKM dan mampu meningkatkan kinerja usaha UMKM di Kabupaten Kuningan.

Dalam meningkatkan kinerja UMKM menurut Nasution dkk (2022) harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM, seperti aspek keuangan, teknologi, sumber daya manusia, inovasi

dan lainnya. Tentu harapannya bahwa kinerja UMKM dapat dimaksimalkan semaksimal mungkin dan segala permasalahan yang menyangkut kinerja UMKM dapat diatasi dengan baik.

Salah satu yang harus ada dalam keberlangsungan UMKM adalah aspek keuangan yaitu peranan modal. Modal merupakan pilar utama untuk memulai usaha atau dalam menjalankan usahanya. Modal adalah faktor yang mempunyai peran cukup penting dalam proses berkembangnya suatu usaha, karena modal diperlukan ketika pengusaha hendak mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas usaha yang sudah ada, tanpa modal yang cukup maka akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha, sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Faktor modal merupakan titik kunci dari setiap usaha di mana modal yang besar akan berpengaruh terhadap besarnya variasi produk dan tenaga kerja (Devi, 2021).

Modal usaha adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Dalam berwirausaha modal dapat diartikan dari berbagai segi yaitu pada prinsipnya dalam menjalankan usaha hanya ada 3 jenis modal yang dikeluarkan yaitu modal investasi awal, modal kerja, dan modal operasional. Modal kerja ini bisa dikeluarkan setiap bulan, atau setiap datang pesanan (order). Pada prinsipnya tanpa modal kerja, pesanan (order) tidak dapat terselesaikan atau tidak ada barang dagang yang diperdagangkan (Aprilia, 2021).

Kebanyakan pelaku UMKM masih menggunakan modal sendiri tanpa terpengaruh sumber modal yang lain. Hal itu bisa menghambat perkembangan dari usahanya sendiri. Dengan adanya modal pinjaman atau sumber modal yang lain diharapkan kegiatan usaha akan lebih berkembang karena bertambahnya modal yang bisa digunakan untuk kegiatan produktif. Pelaku UMKM masih banyak yang memikirkan risiko yang akan didapat jika menggunakan modal selain modal sendiri. Padahal hal tersebut yang bisa menjadi penghambat dari berkembangnya usahanya sendiri. Sebuah usaha bisa dikatakan berkembang apabila jumlah produksi dan tingkat keuntungannya menaik. Dengan modal yang terbatas pelaku UMKM akan lebih sulit untuk menambah jumlah produksi dan peluang untuk mendapatkan keuntungan jauh lebih sedikit (Mukoffi, 2021).

Di sisi lain, masih banyak kendala yang dihadapi dalam permodalan. Modal yang tidak tercukupi dari kegiatan usaha pedagang kecil (UMKM) merupakan bagian pokok masalah hingga mereka tidak tumbuh dengan baik. Sulitnya akses permodalan menjadi masalah yang dihadapi sejak dulu hingga saat ini, yaitu untuk mendapatkan finansial berupa kucuran kredit untuk memiliki modal usaha (Ardiansyah, 2019).

Untuk menjamin optimisme perkembangan UMKM di masa yang akan datang jelas memerlukan penguatan peran dan strategis dalam permodalan, khususnya dari pemerintah untuk mendukungnya atau bahkan peran dari swasta. Pengolahan modal usaha sangat penting karena

menyangkut penetapan kebijakan modal usaha tersebut dalam operasi sehari-hari. Perusahaan atau organisasi memerlukan modal usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya, baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal.

Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kinerja UMKM dalam hal permodalan adalah dengan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan (Andini, 2022). Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Apalagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan subsidi yang tidak sedikit bagi pelaku UMKM di tahun 2023 dengan memberikan jumlah subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 415 triliun (kemenkeu.go.id).

Tentu modal berperan penting dalam berlangsungnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Dengan modal yang maksimal maka akan maksimal juga hasilnya, dan begitu pun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian Herman (2021) yang menyatakan bahwa modal berpengaruh secara signifikan terhadap omset penjualan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, R. L., Kholifah, D. N., & Alamsyah, D. P., (2020) dan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor

modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha. Berdasarkan hasil penelitian empiris tersebut, maka diketahui bahwa akses modal menjadi faktor penting bagi kinerja usaha dan peningkatannya.

Selain modal, permasalahan lainnya adalah terkait dengan faktor produksi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM adalah rendahnya kapasitas dan kualitas produksi yang berkaitan dengan rendahnya kontinuitas produksi, investasi yang kurang efisien, tingkat penerapan teknologi yang rendah, diversifikasi, kualitas dan nilai tambah produk yang rendah. Perusahaan atau organisasi yang menjadikan kualitas produk mereka sebagai instrumen penting akan menikmati keunggulan atas pesaing mereka dalam mengendalikan pasar karena tidak semua perusahaan mampu mencapai popularitas. Artinya suatu perusahaan akan mampu bertahan di tengah persaingan bisnis ini apabila perusahaan tersebut selalu melakukan evaluasi terhadap kualitas produk yang diproduksinya kemudian meningkatkan kualitas dari produk tersebut (Sari et al, 2021).

Perusahaan yang sama sekali tidak memperhatikan kualitas dari produknya, sama saja dengan bunuh diri atau tidak peduli dengan masa depan dari perusahaan tersebut, karena kualitas dari suatu produk akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Perusahaan harus selalu memperhatikan atau melakukan pengendalian atau pengawasan proses produksi barang yang diproduksi agar kualitas dari suatu produk tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Jika

pengendalian dan pengawasan kualitas dilakukan dengan teliti, maka akan berdampak positif bagi perusahaan. Di antara kerusakan atau kecacatan pada produk dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan.

Kualitas produk mengacu pada kapasitas produk untuk menjalankan fungsinya, yang mungkin termasuk kekuatan, kemudahan pengemasan, perbaikan produk (inovasi), atau keandalan atau kemajuan (Nurfauzi et al, 2023). Inovasi produk dilakukan dengan cara memodifikasi produk, perbaikan produk atau bahkan merek baru dari perusahaan yang berkembang melalui penelitian dan upaya pengembangan tersendiri (Kotler dan Armstrong, 2014:603). Menurut Hubeis (2012:76) inovasi perlu dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan tetap dapat bertahan dan menjadi lebih kompetitif.

Memainkan peran selaku inovator, pemerintah daerah sebagai keseluruhan menjadi sumber dalam menciptakan hal-hal baru atau pun juga pendekatan metode-metode baru yang diperlukan untuk upaya “*problem solving*” dan “*action oriented*” (Salam et al, 2022). Pemerintah daerah selaku inovator memiliki peran untuk menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru pada suatu UMKM agar UMKM dapat semakin berkembang. Peran inovator menjadi peran yang sangat penting untuk menunjang kemajuan dari UMKM. Oleh karena itu, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan selaku inovator harus mampu berinovasi menciptakan berbagai ide-ide baru, gagasan-gagasan cemerlang dan mengembangkannya menjadi lebih berdaya

guna dan memiliki nilai manfaat yang tinggi agar semakin maju dan berkembang.

Pengaruh faktor produksi terhadap UMKM telah diteliti oleh Syahputra, A., Ervina, E., & Melisa, M (2020) yang menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufiq, M., Prihatini, R., & Gurendrawati, E (2020) yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Begitu pula Arumsari (2021) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara kualitas produk dengan kelangsungan usaha.

Kinerja UMKM di Indonesia membutuhkan kerja keras karena masih sangat terbelakang dalam menuangkan ide kreatif produknya untuk mampu bersaing di dunia usaha karena jika melihat kondisi di lapangan banyak di antaranya yang tidak mampu bersaing dan tidak berkembang atau bahkan sampai gulung tikar. Hal ini disebabkan oleh kompetensi yang dimiliki masih rendah (Ziana Asyifa et al, 2019).

Menyikapi beberapa permasalahan di atas tentunya UMKM dirasa perlu mendapatkan pengarahan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi berwirausaha agar dapat bertahan dan berkembang. Kompetensi memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM. Penelitian yang dilakukan Satriabayu Rifantama dkk (2022) mengatakan bahwa kompetensi kewirausahaan memegang peranan penting dalam semua

kegiatan. Tanpa dukungan SDM yang terpercaya di dalam suatu organisasi atau perusahaan, meskipun didukung oleh dana dan infrastruktur, SDM bisa menjadi potensi bila dikelola dengan baik, namun menjadi beban bila dikelola secara tidak benar. Kompetensi kewirausahaan seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, memungkinkan orang-orang dengan keterampilan analitis mampu untuk melihat setiap peluang yang ada. Kemampuan analitis untuk melihat semua kemungkinan yang ada. Kemampuan ini membuat orang lebih dapat diidentifikasi, dan meningkatkan kemampuan memungkinkan orang untuk membuat keputusan yang tepat yang dapat meningkatkan kinerja usahanya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggita Tresliyana Suryana dkk (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi kewirausahaan terbukti mempengaruhi kinerja usaha UMKM kopi di Indonesia.

Namun hasil penelitian di atas berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luthfiana (2020) yang menyatakan bahwa variabel modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM Kabupaten Batang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Permana (2018) yang menyatakan bahwa kualitas produk mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja bisnis, hal ini dapat diartikan ternyata kualitas produk yang dimiliki D'Besto belum mampu meningkatkan kinerja bisnis D'Besto.

Berdasarkan beberapa kajian latar belakang serta fenomena *gap* dan *research gap* di atas, maka penelitian ini memasukkan kompetensi kewirausahaan sebagai variabel intervening dengan landasan bahwa kompetensi kewirausahaan merupakan langkah utama dan mendasar yang digunakan untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang kerap dihadapi dalam usahanya untuk menjaga kontinuitas usaha dan untuk terus tumbuh serta berkembang. Variabel bebas yang digunakan dinilai sebagai variabel yang masih jarang dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi kemampuan UMKM untuk berkembang, alih-alih hanya untuk mempertimbangkan kinerja UMKM secara umum. Fenomena yang diangkat masih sangat relevan untuk dibahas mengingat pengaruh UMKM yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara ditambah lagi dengan masih sulitnya ditemukan penelitian yang menguji pengaruh kompetensi kewirausahaan sebagai variabel intervening untuk optimalisasi kinerja UMKM. Objek penelitian merupakan pelaku UMKM dengan spesifikasi ke Usaha Mikro bagian bidang produksi makanan yang berdomisili di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sehingga data yang digunakan adalah data primer. Untuk itu peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Modal Usaha dan Kualitas Produk Terhadap Kinerja UMKM dengan Kompetensi Kewirausahaan Sebagai Variabel Intervening Survei di UMKM Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian di atas yang sudah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Dalam akses memperoleh modal, pelaku UMKM dihadapkan dengan kesulitan dalam mendapatkan akses modalnya seperti bantuan dari bank atau lembaga keuangan non bank.
2. UMKM dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan dalam mengelola aktivitas usahanya. Karena minimnya pengetahuan yang dimiliki baik dari pendidikan atau pelatihan, pelaku UMKM sulit untuk meningkatkan kualitas dalam memproduksi suatu barang.
3. Kinerja UMKM dalam memproduksi atau membuat suatu produk masih sangat terbatas atau belum terlalu maksimal. Mereka tidak mampu melakukan terobosan-terobosan baru, tidak inovatif dalam membuat barang yang diperjualbelikan sehingga terkesan stagnan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas, maka pokok masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah modal usaha dan kualitas produk berpengaruh secara simultan terhadap kinerja UMKM di Kec. Kuningan Kab. Kuningan ?

2. Apakah modal usaha dan kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap kinerja UMKM di Kec. Kuningan Kab. Kuningan ?
3. Apakah modal usaha berpengaruh terhadap kinerja UMKM melalui kompetensi kewirausahaan di Kec. Kuningan Kab. Kuningan ?
4. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kinerja UMKM melalui kompetensi kewirausahaan di Kec. Kuningan Kab. Kuningan ?
5. Apakah kompetensi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kec. Kuningan Kab. Kuningan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan pengaruh modal usaha dan kualitas produk secara simultan terhadap kinerja UMKM di Kec. Kuningan Kab. Kuningan.
2. Untuk menjelaskan pengaruh modal usaha dan kualitas produk secara parsial terhadap kinerja UMKM di Kec. Kuningan Kab. Kuningan.
3. Untuk menjelaskan pengaruh modal usaha terhadap kinerja UMKM melalui kompetensi kewirausahaan di Kec. Kuningan Kab. Kuningan.
4. Untuk menjelaskan pengaruh kualitas produk terhadap kinerja UMKM melalui kompetensi kewirausahaan di Kec. Kuningan Kab. Kuningan.

5. Untuk menjelaskan pengaruh kompetensi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM di Kec. Kuningan Kab. Kuningan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kontribusi teoritis bagi keilmuan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM

Penelitian ini mampu menjadi dasar identifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM khususnya pelaku usaha mikro dan dukungan relevan yang dibutuhkan untuk dapat berkembang.

b. Bagi Regulator / Institusi Publik

Penelitian ini dapat memberikan membantu merumuskan kebijakan yang dapat secara relevan membantu kinerja UMKM.

c. Bagi Instansi Sosial dan Dunia Usaha

Membantu memberikan gambaran terkait bentuk bantuan pemberdayaan yang dibutuhkan UMKM sebagai organisasi yang memiliki banyak perhatian bagi UMKM.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu mempertajam daya pikir ilmiah dalam menanggapi kinerja UMKM yang patutnya diterapkan dalam usaha.

Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Akademik

Sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah sebagai sumbangsih pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

